

BAB 2. SEJARAH, PERKEMBANGAN, DAN TRADISI *BACHA POSH* OLEH TALIBAN

2.1 Perkembangan Kebudayaan di Afghanistan

2.1.1 Masa Dinasti dan Kekaisaran

Pada masa awal berdirinya negara Afghanistan, negara ini dikuasai oleh beberapa kelompok atau bahkan sekte Timur Tengah yang pada saat itu bepergian untuk berdagang dan membangun pemerintahan mereka berupa kerajaan atau bahkan kekaisaran. Bentuk kekaisaran pertama yang ada di Afghanistan ditandai dengan munculnya Dinasti Hotak (Semarang, 2019). Secara resmi, Dinasti ini berdiri pada tahun 1700-an dan dipimpin oleh seorang kepala militer etnis Pashtun Khilji, bernama Mirwais Hotak. Etnis Pashtun Khilji merupakan suku terbesar di wilayah Pashtun, Afghanistan. Sebelum menetap dan berkembang di Afghanistan, masyarakat dari etnis Pashtun Khilji ini merupakan warga Pakistan dan Iran yang kemudian melakukan migrasi ke Afghanistan (Malleon, 1999).

Kekaisaran Dinasti Hotak sendiri berdiri dan bermarkas di Kandahar, Afghanistan. Namun pada tahun 1722 hingga tahun 1727, mereka memperluas pengaruhnya hingga Isfana, Persia (Malleon, 1999). Kemudian pada tahun 1755 hingga 1757, Dinasti Hotak juga menguasai sebagian besar daerah Iran Barat. Sejak awal memimpin Dinasti Hotak, Marwais senantiasa menerapkan ajaran Islam Sunni kepada masyarakat di Afghanistan (Ewans, 2002).

Sekitar tahun 1707, sebagian besar wilayah Kandahar berada dalam kekacauan militer karena kedatangan Dinasti Syiah Safawi dari Persia dan Dinasti Sunni Mughal dari India yang berusaha memperebutkan wilayah Kandahar untuk mereka kuasai dan dijadikan tempat persebaran pemahaman mereka (Ewans, 2002). Mirwais Hotak, yang pada saat itu menjabat sebagai pemimpin dari Suku Pashtun, dikenal memiliki pribadi yang kuat, berpikiran cerdas dan memiliki berpengaruh yang signifikan pada politik

Afghanistan ini kerap dicurigai oleh pemerintah Iran dan India. Mirwais Hotak kemudian ditahan oleh Gurgin Khan sebagai tahanan politik. Gurgin Khan sendiri merupakan gubernur Persia di wilayah tersebut yang mencakup Pashtun. Setelah ditahan, Mirwais Hotak kemudian dikirim ke pengadilan Safawi di Isfahan (Sharifi, 2013).

Di tahun yang sama, Safawi yang dikenal sangat kuat mulai mengalami gejolak dan kemunduran di berbagai bidang seperti bidang politik militer, munculnya perpecahan dan perselisihan internal, adanya intrik, bahkan terus mengalami perang yang tak berkesudahan dengan Dinasti Turki Utsmani. Selama berada di Persia, Mirwais mencoba mempelajari semua kelemahan militer dari Safawi. Wilayah perkotaan Kandahar, Afghanistan, semasa periode dinasti Safawiyah dan Mughal hidup sangat sengsara, karena Safawi memaksa mereka pindah aliran dari Sunni ke Syiah (Sharifi, 2013).

Selama menguasai Afghanistan, Dinasti Safawiyah banyak menyebarkan beberapa budaya dan juga sastra mereka. salah satu budaya yang paling sering diajarkan oleh Dinasti Safawiyah adalah budaya berdagang. Selain itu, Dinasti Safawiyah juga terkenal dengan kerjasama luar negeri dan pembangunan ruang public dengan arsitektur khas mereka, seperti pembangunan alun – alun dan juga gedung – gedung pemerintahan (Dr. H. Syamruddin Nasution, 2013).

Kebudayaan safawi yang muncul di Afghanistan melalui dinasti maupun kerajaan yang ada, lebih menekankan terkait budaya sesuai syariat agama islam. Safawi sendiri memiliki pandangan bahwa kehidupan sosial dan budaya harus dilandaskan pada ketetapan Rasulullah sesuai dengan Piagam Madinah (Dr. H. Syamruddin Nasution, 2013). Sehingga adanya hak dan kewajiban antara laki – laki dan perempuan memiliki perbedaan yang signifikan. Selain terkait dengan cara berpakaian, pada masa dinasti di Afghanistan, pandangan islamisme Safawi ini juga ditandai adanya superioritas terhadap laki – laki, yang mana ditunjukkan pada jabatan – jabatan tertentu dalam dinasti ataupun kerajaan (Dr. H. Syamruddin Nasution, 2013).

2.1.2 Masa awal Kemerdekaan

Setelah berhasil mengalahkan Inggris selama hampir 80 tahun menduduki pemerintahan Afghanistan, secara resmi pada 19 Agustus 1919, Afghanistan menyatakan kemerdekaannya. Pernyataan kemerdekaannya Afghanistan ini ditandai dengan diresmikannya perjanjian Anglo – Afghan, dimana isi perjanjian tersebut mengatur penyerahan kekuasaan dari Inggris kepada pemimpin Afghanistan yang pada saat itu berkuasa (Agency, 2009). Pada awal kemerdekaannya, Afghanistan dipimpin oleh Amanullah Khan. Dikalangan masyarakat Afghanistan, ia dikenal dengan jabatan Amir atau Emir, atau dikenal juga sebagai pejabat tinggi. Jabatan ini ia emban sebelum pada akhirnya ia resmi menjabat sebagai Raja Afghanistan.

Selama menjabat, Raja Amanullah memiliki tujuan politik yang berbeda dari pemimpin – pemimpin Afghanistan sebelumnya. Amanullah melakukan perubahan politik yang signifikan dengan memodernisasi arah politik Afghanistan menuju rancangan – rancangan politik barat (Banuazizi, 1988). Selain itu, istri dari Raja Amanullah, Soraya Tarzi juga dikenal dengan gebrakan – gebrakan baru terkait dengan kebijakan terhadap perempuan dan amat sangat dikenal oleh masyarakat Afghanistan sebagai Ibu Reformasi Afghanistan (Runion, 2007).

Soraya Tarzi atau yang lebih dikenal dengan sebutan Ratu Soraya, merupakan anak perempuan pertama dari Mahmud Tarzi (Runion, 2007). Ayahnya adalah seorang politikus ternama Afghanistan yang pada saat itu mendapatkan kecaman karena membawa paham liberalis barat di negaranya, Afghanistan. Soraya lahir di Damaskus, Suriah pada 24 November 1899. Sejak kecil, Soraya sangat kental dengan ajaran – ajaran dan politik kerajaan Ottoman (Runion, 2007).

Selama menjabat sebagai Ratu Afghanistan, Ratu Soraya sangat gencar mengangkat isu pendidikan bagi perempuan, isu poligami, dan isu terkait pemakaian kerudung (TV, 2021). Sebagai negara yang lahir dengan darah islam yang kuat, ditambah dengan ajaran sunni yang mendarah daging, Afghanistan sangat identic dengan pemakaian kerudung bagi setiap perempuan dan tutup kepala bagi setiap laki

– laki. Raja Amanullah, sebagai suami, juga sangat amat mendukung berbagai gerakan dan isu yang diangkat oleh istrinya, Ratu Soraya. Secara tegas, Raja Amanullah menolak adanya tawaran selir bagi setiap raja di Afghanistan. Selain gencar melakukan perubahan terhadap isu – isu tersebut, Ratu Soraya juga mendirikan sekolah khusus bagi perempuan yang diberi nama *Masturat School* (TV, 2021). Sekolah ini berada di pusat kota Kabul, Afghanistan. Secara khusus, sekolah ini berada langsung dibawah pengawasan Ratu Soraya. Kemudian pada tahun 1926, Ratu Soraya juga diangkat sebagai Menteri Pendidikan Afghanistan guna memaksimalkan upayanya dalam mendukung pendidikan bagi perempuan di Afghanistan. Berkat usahanya dalam mendirikan sekolah khusus perempuan di Afghanistan, setidaknya, pada saat itu, ada 15 perempuan yang bersekolah di *Masturat School* berhasil dikirim ke Turki untuk melanjutkan pendidikan mereka ke jenjang yang lebih tinggi (Runion, 2007).

Pada perayaan hari kemerdekaan Afghanistan pada tahun 1926, Ratu Soraya menyampaikan salah satu pidatonya yang pada saat itu sangat terkenang bagi masyarakat Afghanistan (BBC, Afghanistan: Ratu Soraya mengangkat pendidikan perempuan, isu kerudung dan anti-poligami pada 1920an. Ia mengatakan bahwa;

“ Kemerdekaan kita adalah hak kita semua dan itulah mengapa kita merayakannya. Meski begitu, apakah anda percaya negara kita sejak awal perjuangannya hanya membutuhkan pengabdian kaum pria ? Perempuan juga harus turut andil di tahun – tahun negara kita berdiri, juga islam. Oleh sebab itu, kita harus berusaha mendapatkan sebanyak mungkin pengetahuan, sehingga kita bisa melayani masyarakat, sama seperti perempuan yang telah melakukannya sejak awal masa islam berdiri. “

Selama 10 tahun Raja Amanullah dan Ratu Soraya Tarzi memerintah Afghanistan, setidaknya masyarakat mendapatkan secercah harapan dan juga semangat atas

perubahan terhadap kebijakan dan penguasaan sosial dari pandangan – pandangan islamisme yang kuat dan patriarki (Nafisah, 2019).

2.1.3 Masa penguasaan Taliban

Problem etnis dan kesukuan masih menjadi problem serius dalam internal masyarakat Afghanistan. Hal ini diperparah dengan paham Patriarki yang dianut oleh masyarakat Afghanistan sejak awal negara ini berdiri. Meskipun masa penguasaan Taliban di Afghanistan sudah memasuki abad ke-21, namun kebudayaan – kebudayaan masa lalu masih kental diterapkan walaupun mendapat sedikit perubahan.

Menurut Somaya (Faruqi, 2021), salah satu warga masyarakat Afghanistan, keluarga dengan anak laki – laki akan memiliki kekuatan besar untuk menikahkan anaknya dengan anak perempuan pilihan mereka meski anak perempuan tersebut masih di bawah umur. Di Dalam islam, terdapat syarat mahar dalam pernikahan. Sayangnya dalam praktik budaya Afghanistan, mahar tersebut dijadikan alat jual – beli anak perempuan mereka. Mahar tersebut nantinya akan dijadikan hak milik bagi keluarga anak perempuan dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan mereka, seperti sandang, pangan dan papan. Sedangkan anak perempuan mereka akan sepenuhnya menjadi milik keluarga laki – laki setelah menikah. Kekerasan seperti pemukulan dan cambuk menjadi hal wajar bagi perempuan setelah menikah. Mereka tidak berhak melawan atau bahkan mengadu dengan orangtua kandung.

Meskipun demikian, tentu masih ada perbedaan yang muncul dari perkembangan budaya di Afghanistan. Jika pada jaman kependudukan Taliban pada tahun 1996 hingga tahun 2001, perempuan setelah menikah tidak mampu melakukan hal apapun, termasuk ketika suami mereka memutuskan untuk melakukan poligami. Kemudian, didalam sebuah pernikahan, keluarga laki – laki akan mendapatkan kekuatan penuh dalam mengatur arah pernikahan dan bagaimana pernikahan tersebut harus berjalan. Tugas utama perempuan hanya lah melayani suami dan membereskan rumah. Sedangkan pada masa kekuasaan Taliban baru, di tahun 2021 hingga sekarang, perempuan sudah diberikan hak untuk berpisah dari pasangan mereka, perempuan

sudah diberikan kesempatan untuk bekerja meski harus tetap dirumah dan harus melayani konsumen sesama perempuan saja (RAWA, *Some of the restrictions imposed by Taliban on women in Afghanistan*).

Selain itu, tindak terorisme yang meningkat pada masa kekuasaan Taliban di Afghanistan ini mengakibatkan banyaknya perubahan pada bangunan di Afghanistan. Karena hidup mereka penuh ancaman perang dan incaran terorisme, maka dalam pembangunan rumah atau bangunan public, masyarakat Afghanistan selalu membangun rumah mereka dengan desain tertutup dan tembok tinggi.

2.2 Sejarah Kelompok Milisi Taliban di Afghanistan

Afghanistan merupakan salah satu negara yang menempati posisi ke-44 sebagai Negara terpadat di dunia setelah Malaysia. Perbandingan tersebut dapat dilihat pada *Tabel 2.1*. Secara keseluruhan, masyarakat Afghanistan berjumlah 32 juta jiwa dengan jumlah persentase antara laki – laki dan perempuan sebanyak 34% laki – laki dan 66% perempuan. Secara geografis, Afghanistan terletak diantara 2 benua, yaitu Asia Selatan dan Asia Tengah (Corporation, 2018).

Tabel 2.1 Perbandingan Jumlah Penduduk Pada Ranking Negara Terpadat di Dunia

43	Malaysia	33.120.000 jiwa
44	Afghanistan	32.820.000 jiwa
45	Angola	32.096.000 jiwa

(Sumber : Olah Data Bank Dunia)

Sejarah kemunculan Afghanistan sebagai suatu Negara kesatuan dimulai pada abad ke-18 setelah adanya perang saudara dan juga perang dunia 1 dan perang dunia 2. Pada abad ini, Afghanistan masih berbentuk Negara Kekaisaran dengan sistem

pemerintahan yang otoriter (A.F, 2021). Hingga pada abad ke-19, Afghanistan mulai diakui sebagai suatu Negara kesatuan setelah masa kepemimpinan Raja Amanullah (L.B). Di abad ke-19 ini Afghanistan memulai adanya kerjasama dengan Britania Raya dan juga Uni Soviet dalam kaitannya dengan Perang Dunia 1 dan Perang Dunia 2 . Sayangnya, selama menjalin kerjasama dengan Britania Raya dan juga Uni Soviet, Afghanistan merasakan banyak bermunculan perang saudara. Perang ini lambat laun merusak adanya sistem pemerintahan dan juga kesejahteraan dalam masyarakat (A.F, 2021).



Gambar 2.1 *Raja Amanullah Khan*
(Sumber : Encyclopedia Britannica)

Pada masa awal kepemimpinan Raja Amanullah (*Gambar 2.1*), Afghanistan mencoba untuk membuka diri dan menerapkan modernisasi dari internal maupun eksternal negara. Usaha ini ditujukan sebagai suatu bentuk meminimalisir timbulnya perang saudara dan juga pemberontakan didalam pemerintahan Afghanistan. Sayangnya, upaya ini gagal dan pemerintahan Raja Amanullah digulingkan (L.B).

Selanjutnya, Pemerintahan Afghanistan dipimpin oleh Zhahir Syah, seperti pada *Gambar 2.2*. Salah satu Panglima TNI Afghanistan yang pada saat itu mendominasi kekuatan disana. Selama masa pemerintahan Zhahir Syah, Afghanistan menemui titik damai selama 40 tahun berturut – turut. Zhahir Syah secara resmi berhasil menekan adanya pemberontakan dan juga perang saudara di Afghanistan.

Selain itu, Zhahir Syah juga berhasil memperkuat militer serta pertahanan Afghanistan selama terjadinya Perang Dunia ke-2 (News B. , 2001).



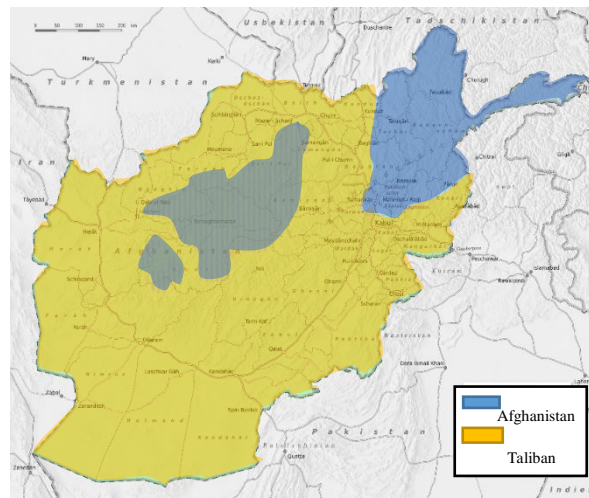
Gambar 2.2 Raja Zahir Syah

(Sumber : Encyclopedia Britannica)

Di akhir tahun 1990an, Afghanistan mengalami gejolak besar dalam pemerintahannya. Gejolak ini muncul setelah adanya kelompok militan penentang pemerintah yang dikenal dengan sebutan kelompok bersenjata Taliban. Secara resmi, Taliban berdiri dan terbentuk pada bulan September tahun 1994. Taliban ini pertama kali muncul di Pashtun, salah satu kota di tepi Timur Afghanistan (Rashid, 2010). Kota ini kemudian dijadikan sebagai pangkalan militer besar Afghanistan. Kelompok Taliban ini juga menamakan pemerintahan mereka dengan sebutan Keamiran Islam Afghanistan. Pada awal berdirinya, yaitu tahun 1994, Kelompok Taliban ini mendapatkan dukungan penuh berupa dukungan militer dan juga dana dari Amerika Serikat dan Pakistan. Kekuatan militer dan kependudukan Taliban di Afghanistan semakin diperkuat dengan adanya pengakuan secara hukum oleh 3 negara anggota PBB yaitu Uni Emirates Arab, Pakistan dan juga Arab Saudi (Rashid, 2010).

Dari tahun 1994 hingga tahun 1996, Taliban melaksanakan pergerakan pertama mereka dengan membentuk kelompok milisi di seluruh kota di wilayah Afghanistan dengan markas pusat tetap di Pashtun, hal tersebut sesuai dengan peta pada *Gambar 2.3*. Pemimpin pertama Taliban yang berhasil memimpin pergerakan milisi ini adalah

Mohammed Omar (Weiner, 2001). Melalui pergerakan ini, Kelompok Taliban berhasil untuk merekrut lebih banyak lagi pasukan dan juga pengikut setia mereka. Setelah berhasil memperkuat pasukan militer dan meningkatkan dukungan dari para pengikutnya, secara resmi pada akhir tahun 1999, Taliban mulai meresmikan keberadaan dan sistem pemerintahan yang dianutnya (Weiner, 2001).



Gambar 2.3 Peta Persebaran Pengaruh dan Kedudukan Taliban di Afghanistan

(Sumber : Weiner, 2001)

Sayangnya, tidak berselang lama dari keberhasilan penguatan milisi mereka, pada tahun 2001, hubungan antara Taliban dengan sekutunya yaitu Amerika Serikat ini merenggang. Hal ini dilatarbelakangi karena adanya dugaan yang muncul dari Amerika Serikat bahwa Taliban menjadi satu – satunya kelompok yang melindungi keberadaan pemimpin Al-Qaeda (POLRI, 2022). Pada masa itu, Amerika Serikat baru saja mendapatkan serangan udara dari Kelompok Al-Qaeda. Kelompok ini merupakan kelompok milisi islam di Pakistan yang menentang adanya kekuasaan dan pengaruh barat. Serangan yang dilakukan oleh Al-Qaeda ini dilakukan di gedung menara kembar WTC, New York pada 11 September 2001 (Bergen, 2001). Kejadian tersebut bermula dari adanya empat pesawat komersial Amerika Serikat yang melintasi wilayah New York. Keempat pesawat tersebut kemudian diduga digunakan sebagai alat peluru

kendali dalam melakukan serangan udara. Pesawat tersebut kemudian menabrakkan diri ke menara kembar WTC, New York dari arah selatan dan utara secara bersamaan. Pesawat tersebut juga diduga telah disita dan dialihtangankan kepada pasukan Al-Qaeda yang melakukan serangan udara. Akibat dari serangan ini, bangunan – bangunan di sekitarnya terbakar dan menara kembar WTC pun hancur. Peristiwa ini setidaknya memakan 2977 korban jiwa. Dimana diantaranya 246 penumpang pesawat, 2606 orang yang berada didalam gedung menara kembar WTC dan 125 orang warga yang berada di sekitar gedung menara kembar WTC (Bergen, 2001).

Dari peristiwa serangan udara yang dilakukan oleh kelompok Al-Qaeda ini, sebenarnya kelompok tersebut ingin menunjukkan sikap amarah dan kebenciannya kepada Amerika Serikat karena terus menerus melakukan kerjasama dan menopang kelompok – kelompok islam dalam kaitannya dengan bantuan militer dan persenjataannya. Menurut mereka, sikap yang dilakukan oleh Amerika Serikat ini justru akan mencederai adanya tujuan utama dalam kelompok – kelompok islam tersebut. Adapun upaya yang dilakukan oleh Amerika Serikat dalam mendukung pemasukkan dari segi militer maupun pendanaan kelompok Taliban, oleh kelompok Al-Qaeda justru dianggap sebagai suatu kudeta (Arifin, 2008).

Pasca kejadian tersebut, pemerintahan Amerika Serikat dibawah kepemimpinan George W. Bush langsung melakukan invasi ke wilayah Kabul, Afghanistan (Bergen, 2001). Invasi ini didasari atas perlindungan militer kepada Osama bin Laden yang merupakan pemimpin Al-Qaeda oleh kelompok Taliban. Disamping itu, sebagian besar anggota militer Al-Qaeda memang berada di wilayah milisi Taliban, tepatnya di kota Kabul, Afghanistan. Invasi dadakan yang dilakukan oleh Amerika Serikat ini membuat pasukan Taliban yang berada di wilayah Kabul tidak dapat menahan serangan tersebut. Hingga pada awal tahun 2002, Amerika Serikat berhasil memukul mundur pasukan Taliban di Kabul dan mulai menguasai Afghanistan bersama dengan sekutunya yaitu Inggris dan Jerman (Malkasian, 2021).

Melihat adanya tekanan dan paksaan untuk meninggalkan Afghanistan yang dilakukan oleh Amerika Serikat kepada kelompok Taliban, membuat kelompok ini terus melakukan strategi perlawanan. Salah satu strategi yang dilakukan oleh Kelompok Taliban adalah adanya penawaran penyerahan diri yang dilakukan mereka terhadap militer Amerika Serikat. Hal ini dilakukan pada Desember tahun 2002 sebagai upaya agar Amerika Serikat mau menarik mundur pasukan mereka dari kota Kabul dan berhenti untuk melakukan pendudukan wilayah bersama dengan sekutunya yaitu Inggris dan Jerman. Sayangnya upaya yang dilakukan oleh Taliban ini langsung ditolak oleh pemerintah Amerika Serikat (Sorongan, 2021).

Selama pendudukan Amerika Serikat di wilayah Afghanistan, Amerika Serikat ini berupaya untuk merubah seluruh kebijakan – kebijakan tradisional yang ditetapkan oleh Taliban disana. Menghilangkannya kebijakan pengurangan terhadap perempuan hingga berusaha membuka kembali sektor pendidikan bagi perempuan menjadi fokus utama pemerintah Amerika Serikat di Afghanistan (BBC, 2022). Sikap ini cenderung dipandang brutal dan sangat melawan adanya norma – norma yang ada di Afghanistan sebelumnya. Terlebih lagi, sikap Afghanistan yang mengkhianati kerjasama antara Amerika Serikat dengan Taliban sebelumnya juga semakin memicu amarah dari kelompok Taliban. Amerika Serikat yang sebelumnya menjadi pemasok dan pendonor dana militer bagi Taliban justru kemudian menentang segala kebijakan dan juga norma yang diberlakukan oleh Taliban. Sejak saat itu, Taliban kemudian terus melakukan pemberontakan tanpa memandang keamanan dan keselamatan masyarakat sipil di Afghanistan. Terlebih lagi, pemberontakan yang dilakukan oleh kelompok Taliban ini sebagai suatu upaya dalam pertahanan kekuasaan dan perluasan wilayah mereka.

Dalam waktu dua bulan, kelompok bersenjata di bawah kepemimpinan Amerika Serikat dan mitra serta sekutunya berhasil menghancurkan Taliban, menggulingkan pemerintahannya, dan memaksa para pendukungnya untuk kabur dan mengungsi ke Pakistan (Ariebowo, 2009). Tetapi pada kenyataannya Taliban belum menghilang, mereka terus memperluas pengaruhnya, beberapa bersembunyi di gua-

gua. Bahkan, kelompok tersebut dapat memperoleh jutaan dolar dalam setahun dari perdagangan narkoba, penambangan, dan pengumpulan pajak. Kelompok Taliban juga dengan cepat memperluas pengaruhnya, menerapkan atau mendukung penegakan hukum Syariah, termasuk eksekusi di ruang publik terhadap para terpidana pembunuh dan pezina, serta melakukan amputasi paksa terhadap mereka yang dihukum karena melakukan pencurian. Setelah itu, laki-laki diwajibkan berjenggot dan perempuan harus mengenakan burqa untuk menutupi aurat mereka dari mulai wajah hingga tubuh. Taliban juga melarang adanya bioskop. Mereka juga menolak anak perempuan dari usia 10 tahun untuk pergi ke sekolah. Amerika Serikat memang berhasil memukul mundur pasukan Taliban, akan tetapi banyak dari mereka yang selamat. Pada akhir konflik paling krusial di Afghanistan sejak tahun 2014 dan 2001, pasukan internasional dibawah kepemimpinan Amerika Serikat mengakhiri aktivitas pertempuran militer mereka dan masyarakat Afghanistan terus memerangi kebijakan Taliban. Taliban kemudian merebut kembali sebagian besar kota di Afghanistan dan melancarkan serangan bom terhadap target pemerintah maupun masyarakat sipil. Pada tahun 2018, data PBB dan NATO menunjukkan bahwa Taliban masih aktif secara terbuka di 70% kota dan desa di Afghanistan (UN, 2021).

Pada Februari 2020, Amerika Serikat dan Taliban menandatangani "Perjanjian untuk Memulihkan Perdamaian" di Afghanistan dari adanya perang yang sudah berlangsung sejak lama. Berdasarkan perjanjian itu, Amerika Serikat dan sekutunya serta anggota NATO akan menarik semua pasukan, dengan syarat Taliban tidak lagi mengizinkan al-Qaeda atau kelompok militan lainnya beroperasi di wilayah yang mereka kuasai (Ariebowo, 2009). Sebagai hasil dari perjanjian perdamaian ini, Taliban dan pemerintah Afghanistan mulai membebaskan para tahanan militer. Sekitar 5.000 anggota milisi Taliban dibebaskan beberapa bulan setelah kesepakatan tercapai. Amerika Serikat juga telah berjanji untuk mencabut sanksi terhadap Taliban dan berkoordinasi dengan PBB untuk mencabut sanksi lainnya. Amerika Serikat melakukan negosiasi langsung dengan Taliban tanpa kehadiran pemerintah Afghanistan (RI, 2020).

2.3 Kehidupan Perempuan Era Kependudukan Taliban (1996 - 2001)

Sebelum munculnya Kelompok Milisi Taliban, perempuan – perempuan di Afghanistan dilindungi oleh pemerintah dibawah payung hukum yang berlaku dan diberikan hak - hak dalam hidup bermasyarakat di Afghanistan. Kemudian, pada tahun 1920 an, Perempuan di Afghanistan mulai menerima haknya dalam hal berpendapat dalam politik dan memiliki hak pilih. Sedangkan pada awal tahun 1960an, perempuan di Afghanistan diberikan hukum dasar kuat dalam konstitusi yang berkaitan dengan kesetaraan gender. Bahkan pada tahun 1977, lebih dari 15% dari badan legislatif tertinggi Afghanistan diisi oleh perempuan (Lestari, 2021). Sedangkan pada awal tahun 1990-an, 70% guru sekolah, 50% pegawai pemerintah dan mahasiswa, serta 40% dokter di Kabul juga di isi oleh perempuan. Hal tersebut sesuai dengan *Tabel 2.2*.

Tabel 2.2 Jumlah Persentase Keterlibatan Perempuan di Afghanistan

No.	Jenis Pekerjaan	Persentase Keterlibatan Perempuan
Tahun 1977		
1.	Anggota Parlemen Legislatif	15 % dari keseluruhan jumlah anggota
Tahun 1990		
1.	Guru Sekolah	70% dari keseluruhan jumlah guru di Kabul
2.	Pegawai Pemerintah / Mahasiswa	50% dari keseluruhan jumlah pegawai pemerintahan di Afghanistan
3.	Dokter	40% dari keseluruhan jumlah dokter di Kota Kabul

Sejak dahulu, perempuan Afghanistan dikenal telah aktif dalam organisasi bantuan kemanusiaan. Kontribusi aktif setiap perempuan di Afghanistan ini barulah menemui aturan yang ketat pada saat Taliban menguasai pemerintahan Afghanistan

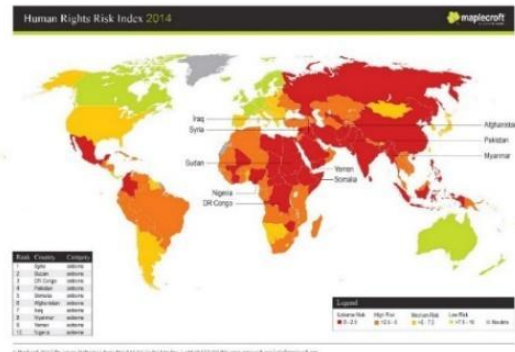
dan menerapkan aturan ketat pada setiap perempuan. Di Dalam Islam, terdapat tradisi yang sangat kental terkait dengan perlindungan hak - hak perempuan dan anak. Meskipun demikian, Islam juga memiliki ketentuan khusus yang didalamnya mendefinisikan hak - hak perempuan dalam perkawinan, perceraian, dan pembagian hak waris. Sayangnya Islam yang dianut oleh Kelompok Taliban tidak sama sekali berkaca pada Islam yang diterapkan oleh Muslim di Dunia. Meskipun demikian, Taliban kemudian masih memberikan klaim bahwa setiap kebijakan dan tindakan yang mereka ambil merupakan hal – hal yang didasarkan pada kepentingan perempuan dan anak. Sedangkan pada kenyataannya, Rezim Taliban lah yang secara kejam telah membuat mereka, para perempuan dan anak perempuan, kemudian jatuh miskin, memberikan pelayanan kesehatan yang buruk, menghilangkan hak mereka dalam pendidikan dan pekerjaan (Lestari, 2021).

Dengan sistem patriarki yang kuat dan pemahaman syariat islam yang kental di Afghanistan, eksistensi perempuan justru semakin tidak terlihat. Mereka tidak hanya dipaksa menyembunyikan tubuh mereka dengan mengenakan burqa yang sangat tertutup tetapi juga dipaksa untuk menyembunyikan identitas mereka di khalayak umum. Sejak pemerintahan Afghanistan terbentuk, negara ini memang memiliki hukum khusus terkait pemerintahan sipil bagi setiap perempuan dan anak perempuan. Hukum Afghanistan mengatur bahwa setiap anak perempuan yang lahir akan dicatatkan kelahirannya tanpa mencantumkan nama yang diberikan kepadanya. ACCRA atau *Afghanistan Central Civil Registration Authorized* sebagai Badan resmi pencatatan sipil Afghanistan hanya akan mencantumkan nama ayah dari setiap bayi perempuan yang lahir di Afghanistan. Hal ini juga diterapkan pada setiap pencatatan pernikahan di Afghanistan. Hanya nama suami lah yang akan tercatat di dalam akta pernikahan (Nowrouzi, 2020).

Aturan ini kemudian menjadi jauh lebih mengikat bagi perempuan dan anak perempuan di Afghanistan pasca pendudukan Rezim Taliban. Taliban mengecam keras penyebutan nama dari setiap perempuan atau anak perempuan kepada laki – laki di

ruang publik. Bahkan Taliban akan memberikan sanksi berupa kekerasan fisik hingga pencabutan izin praktek bagi dokter yang diketahui menanyakan nama pasien perempuannya dan melakukan penyiksaan kepada orangtua yang memberitahukan nama anak perempuannya saat melakukan pemeriksaan medis. Hal semacam ini nyatanya berlaku pada semua sektor kehidupan di Afghanistan. Menyebutkan nama perempuan kepada laki – laki disebut sebagai sebuah bentuk penghinaan. Bahkan keluarga yang berusaha menerapkan liberalisme terkait kesetaraan gender di keluarganya dianggap tidak bermoral dan jauh dari syariat (Nowrouzi, 2020). Dari banyaknya peraturan yang ketat yang diterapkan oleh Taliban kepada perempuan dan anak perempuan, lambat laun menimbulkan ketakutan dan rasa trauma bagi mereka dalam mengenali dirinya melalui nama yang mereka miliki.

Afghanistan dalam tatanan Rezim Taliban sudah sangat dikenal memiliki penanganan terkait pelanggaran HAM terburuk di dunia. Bahkan pada tahun 2014, melalui lembaga survei internasional, Maplecroft, Afghanistan masuk ke dalam urutan ke-6 sebagai negara dengan resiko tinggi terkait dengan pelanggaran HAM (dapat dilihat di *Gambar 2.4*). Maplecroft juga menyatakan bahwa 70% factor peningkatan pelanggaran HAM terjadi karena adanya represi kebebasan berpendapat; konflik etnis dan sektarian; kurangnya perlindungan pekerja; dan persaingan untuk tanah dan air antara penduduk lokal dan pengguna bisnis industry. Di Bawah rezim Taliban, hampir segala sektor kependudukan ditekan dan hak – hak dasar masyarakat pun dihilangkan (Maplecroft, 2014). Dari sinilah masyarakat dunia mulai mendefinisikan bahwa perang Taliban melawan perempuan sangat mengerikan.



Gambar 2.4 Human Right Risk Atlas 2014
 (Sumber : HRRR Maplecroft 2014)

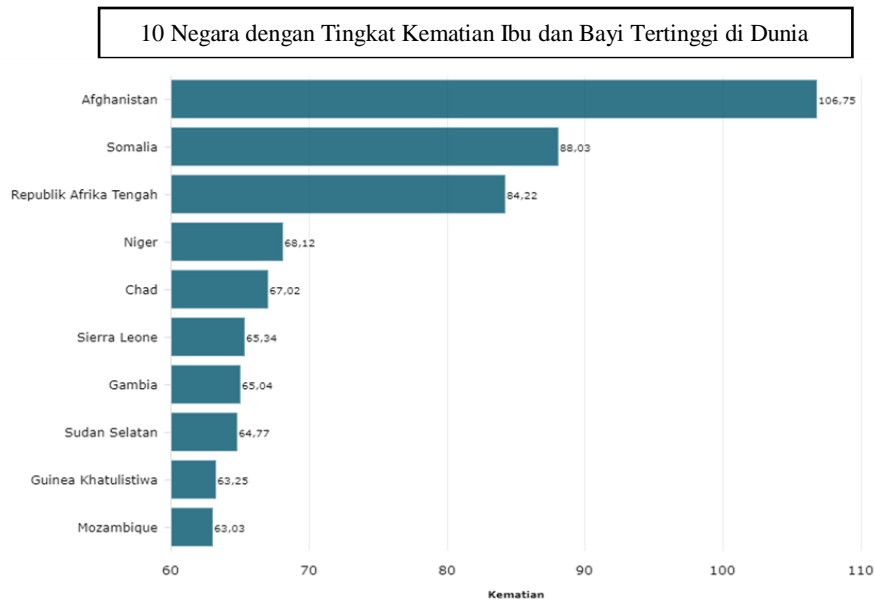
Taliban sendiri pertama kali muncul sebagai kelompok Muslim di Afghanistan tahun 1994 dan mulai menginvasi ibukota Afghanistan, yaitu Kabul di tahun 1996. Invasi tersebut menyusul adanya perang saudara dan ketidakstabilan politik di Afghanistan selama lebih dari 20 tahun. Sebagian besar masyarakat Afghanistan pada awalnya mengharapkan Taliban mampu untuk membawa stabilitas dalam kebijakan pemerintah Afghanistan (Ariebowo, 2009). Namun, tak lama setelah merebut kekuasaan di kursi pemerintahan, Taliban justru memberlakukan perintah yang ketat dan menindas berdasarkan kesalahpahaman dalam hukum Islam. Segera setelah Taliban berkuasa di Kabul, serangan terhadap keberadaan perempuan dimulai. Taliban menutup perguruan tinggi wanita dan memaksa semua wanita untuk melepaskan pekerjaan mereka. Tentu saja, ini berdampak pada terbatasnya akses perempuan terhadap perawatan kesehatan. Selain itu, Taliban dengan kejam menerapkan aturan berpakaian dan memberikan batasan bagi pergerakan wanita di ruang publik. Selain itu, Taliban telah tercatat banyak melakukan tindakan kekerasan yang jauh lebih kejam terhadap perempuan, termasuk melakukan penculikan, menikahkan anak dibawah umur secara paksa, bahkan pemerkosaan. Akibatnya, beberapa keluarga terpaksa mengirim anak perempuan mereka ke Pakistan atau Iran sebagai perlindungan bagi anak perempuan mereka dari kekejaman Rezim Taliban. Perempuan yang hidup di

bawah Rezim Taliban sebenarnya memiliki dunia kerja yang tertutup bagi mereka. Tidak ada sumber pendapatan bagi 50.000 wanita yang kehilangan suami dan kerabat pria lainnya selama Perang Saudara di Afghanistan berakibat pada banyaknya wanita yang terpaksa menjual semua barang-barang yang mereka miliki, dari perabot rumah tangga hingga pakaian dan terpaksa mengemis di jalanan. Hal ini dilakukan untuk menghidupi keluarganya (Sirait, 2021).

Membatasi akses perempuan untuk bekerja adalah kebijakan paling kontroversial dari Taliban yang berdampak pada berbagai sektor. Menghilangkan akses perempuan ke jenjang pendidikan juga menjadi kebijakan yang banyak menekan kebebasan perempuan di Afghanistan oleh Taliban. Sudah sejak invasi Taliban di Kabul, pada tahun 1996, setiap anak perempuan di atas usia sepuluh tahun dilarang bersekolah. Sebagai dampak dari berbagai sikap yang dilakukan Taliban kepada setiap perempuan di Afghanistan, semakin menenggelamkan perempuan dalam kemiskinan dan krisis kebebasan. Sejalan dengan hal tersebut, Taliban juga secara tidak langsung menyatakan bahwa masa depan setiap perempuan di Afghanistan tidak terjamin. Di bawah Rezim Taliban, setiap perempuan di Afghanistan juga hanya diberikan pelayanan terkait kesehatan dan perawatan medis pada level paling dasar. Hal ini kemudian berakibat pada meningkatnya tingkat kerentanan kesehatan bagi perempuan di masa depan. Rezim Taliban juga mengeluarkan kebijakan bahwa setiap dokter laki – laki yang melakukan praktek hanya boleh melayani dan memberikan perawatan medis kepada pasien perempuannya, apabila pasien tersebut berpakaian Burqa lengkap dan tertutup sesuai dengan aturan yang ada. Pasien perempuan dan Pasien laki – laki juga diwajibkan untuk menggunakan peralatan medis yang berbeda dan pemberian obat dengan kualitas yang berbeda pula. Akibat dari kebijakan tersebut, tingkat kematian pada perempuan dan munculnya penderitaan yang berkepanjangan bagi perempuan ikut meningkat. Bahkan, Afghanistan memiliki data paling buruk di dunia terkait kematian ibu dan bayi, hal ini seperti yang terlihat pada *Diagram 2.1*. Hal ini kemudian sejalan dengan adanya peningkatan pada kematian anak di Afghanistan.

Menurut Dana Darurat Anak Internasional PBB (UNICEF), 165 dari setiap 1.000 bayi meninggal sebelum ulang tahun pertama mereka (Indonesia, 2021).

Diagram 2.1 Data Kematian Ibu dan Bayi di 10 Negara Peringkat Tertinggi Dunia



(Sumber : UNICEF)

Pada awal tahun 2001, tepatnya di bulan Mei, Rezim Taliban sempat melakukan intervensi dan penutupan sepihak pada layanan kesehatan atau rumah sakit sementara di wilayah kota Kabul yang dibangun dan didanai langsung oleh organisasi internasional karena adanya laporan bahwa didalam perawat laki – laki dan perempuan diduga berkumpul bersama tanpa adanya pemisah di bangsal dan juga ruang makan rumah sakit tersebut. Hal ini cukup mendapatkan kecaman dari organisasi – organisasi internasional kepada Rezim Taliban karena hampir lebih dari 70% pengadaan rumah sakit dan pemenuhan pelayanan kesehatan di Afghanistan tersebut didanai dan diinisiasi langsung oleh organisasi internasional (Nafisah, 2019). Hal ini dilakukan sebagai upaya pemenuhan hak setiap perempuan dan anak di Afghanistan dalam pengobatan dan kesejahteraan mereka. Selain itu, Rezim Taliban juga mewajibkan setiap rumah di Afghanistan untuk mengecat jendela mereka agar pergerakan

perempuan di rumah tidak dapat dilihat oleh pihak luar. Kebijakan ini menekan adanya kesehatan mental bagi setiap perempuan dan anak di Afghanistan karena secara tidak langsung Rezim Taliban mengisolasi mereka di dalam kediaman mereka sendiri. Salah seorang dokter yang bekerja pada organisasi internasional Eropada dalam kaitannya penegakkan HAM di Afghanistan juga menyatakan bahwa tingkat bunuh diri perempuan di Afghanistan cukup tinggi, bahkan mereka melakukan tindakan bunuh diri tersebut dengan cara menelan asam baterai maupun obat pembersih alat rumah tangga. Hal ini dilakukan karena cara – cara tersebut dipandang mudah dan murah didapatkan oleh setiap perempuan di Afghanistan (Friba, 2018).

Bagi masyarakat di wilayah perkotaan, Rezim Taliban sudah dikenal sangat keji memberlakukan sanksi terhadap aturan pemakaian Burqa bagi setiap perempuan. Burqa sendiri adalah pakaian panjang yang menutupi seluruh tubuh wanita dari ujung kepala hingga ujung kaki. Dalam laporan yang disampaikan oleh seorang jurnalis Anglo Afghanistan juga menyatakan bahwa setiap perempuan yang mengenakan Burqa sesuai dengan aturan dari Rezim Taliban seringkali susah bernafas, karena Burqa tersebut memiliki bagian pada cadar yang sangat tebal. Kemudian para perempuan tersebut juga sulit untuk melihat secara jelas, karena Burqa yang diwajibkan bagi mereka hanya memiliki jala kecil yang menutup bagian mata mereka (terlihat pada *Gambar 2.5*). Hal ini sangat tidak sejalan dengan penerapan penggunaan burqa di Negara islam lain atau bahkan para masyarakat muslim di Amerika Serikat. Di Negara – Negara tersebut, burqa dijadikan pakaian opsional, dimana masyarakat muslim diberikan kebebasan untuk mengenkannya sesuai dengan kesiapan dan keyakinannya. Hal tersebut dijadikan sebagai pilihan individu, bukan merupakan ketetapan pemerintah. Aturan ini sama sekali tidak dapat dilanggar oleh setiap perempuan di Afghanistan. Secara tegas Rezim Taliban telah memberikan sanksi bagi setiap perempuan yang melanggar, sanksi tersebut dapat berupa denda, ancaman atau bahkan tindak kekerasan fisik di tempat umum. Sanksi tersebut akan diberikan pula kepada setiap perempuan yang menunjukkan kaki mereka bahkan pergelangan kaki mereka saat berjalan ditempat umum, maupun memperlihatkan tangan dan

pergelangan tangan mereka, meskipun hal tersebut dilakukan secara tidak sengaja. Pemakaian Burqa juga tidak dibataskan pada usia. Setiap anak perempuan di Afghanistan yang sudah berumur 6 atau bahkan 7 tahun pun diwajibkan mengenakan Burqa. Tidak ada pengecualian yang diizinkan oleh peraturan yang diterbitkan Taliban (Noorozi, 2021).



Gambar 2.5 Perempuan dan Penggunaan Burqa di Afghanistan

(Sumber : United Nation News, 2022)

Burqa tidak hanya menjadi beban fisik dan mental bagi semua perempuan di Afghanistan, tetapi juga beban finansial yang signifikan. Banyak wanita tidak mampu untuk mencari nafkah. Dalam beberapa kasus, perempuan dalam satu lingkungan akan berbagi pakaian Burqa mereka dan setiap perempuan juga harus menunggu berhari-hari untuk giliran mereka dapat bergantian mengenakan Burqa tersebut. Pembatasan berpakaian juga dilengkapi dengan pembatasan perhiasan pribadi lainnya. Riasan dan penggunaan cat kuku dilarang. Kaus kaki putih juga dilarang termasuk penggunaan sepatu dengan alas keras yang mampu menciptakan bunyi saat digunakan untuk berjalan, karena perempuan bagi Taliban diwajibkan untuk berjalan dengan tenang dan hening.

Meskipun perempuan sudah menaati aturan dari Rezim Taliban terkait dengan aturan berpakaian, namun masih banyak aturan lain yang jauh lebih mengikat dan mengekang kebebasan perempuan di Afghanistan. Aturan tersebut adalah adanya pembatasan bagi setiap perempuan di Afghanistan untuk bepergian keluar rumah tanpa

adanya pendampingan dari suami, ayah, maupun kerabat laki – lakinya. Pada penggunaan transportasi umum, perempuan juga akan dilarang jika tanpa adanya pendampingan. Bahkan sopir transportasi umum tersebut juga akan terancam dipecat atau kehilangan SIM nya jika mereka tetap memaksa membawa penumpang perempuan tanpa adanya pendampingan dari suami, ayah maupun kerabat laki – lakinya. Meskipun demikian, Rezim Taliban juga menyediakan transportasi umum khusus perempuan, dimana semuanya diperuntukan bagi perempuan, seperti adanya bus khusus perempuan. Akan tetapi, Taliban juga mewajibkan setiap transportasi umum khusus perempuan tersebut untuk mengecat atau menutup jendela mereka agar tidak ada satupun laki – laki di ruang public yang dapat melihat penumpang perempuan di dalamnya (Haiphong, 2021).

Selain itu, bagi setiap perempuan yang diketahui bertemu dan memiliki hubungan dengan seorang laki – laki yang bukan kerabatnya, perempuan tersebut akan dikenakan sanksi berupa hukuman cambuk dengan jumlah 10 cambukan. Hukuman ini akan dilakukan di ruang public dan diperlihatkan langsung pada setiap laki – laki yang berada disana. Sedangkan, bagi setiap perempuan yang diketahui sudah menikah dan justru menjalin hubungan dengan laki – laki lain yang bukan kerabatnya, maka perempuan tersebut akan dihukum mati (Haiphong, 2021). Begitulah penyimpangan keadilan terhadap perempuan dan anak perempuan oleh Rezim Taliban, yang mencakup tindak persidangan dengan adanya keputusan sepihak, melakukan amputasi secara paksa kepada setiap individu yang diketahui mencuri, bahkan eksekusi mati.

Menurut Syarifurohmat Pratama Santoso di dalam kajian bukunya (Santoso, 2020), Sejak tahun 1996 hingga tahun 2001, Rezim Taliban telah banyak melakukan kebijakan dan tindakan brutal terkait dengan tindak terorisme. Taliban secara sengaja melakukan genosida terhadap warga sipil di Afghanistan dan melakukan pencurian serta penyitaan paksa bantuan dan pasokan makanan yang dikirim oleh PBB. Kebijakan kontroversial lain oleh Taliban adalah membumihanguskan seluruh wilayah Afghanistan yang memiliki jenis tanah subur, serta melakukan pemberontakan dengan

menghancurkan rumah – rumah warga. Hal ini dilakukan untuk menghambat adanya pemberontakan baru yang akan menentang kekuasaan Taliban. Taliban juga diduga menghancurkan Patung Buddha Bamiyan yang telah berusia 1500 tahun. Hal ini dianggap sebagai bentuk perlawanan terhadap ideology lain diluar islam. Sementara itu, seperti dilansir BBC, Para pria diharuskan menumbuhkan jenggot, sedangkan para perempuan diwajibkan mengenakan burqa yang menutup seluruh tubuh. Taliban melarang televisi, musik, dan bioskop, juga tidak memperbolehkan anak perempuan di atas sepuluh tahun bersekolah (News D. , 2021). Akibat dari semua tindakan ini, Taliban dianggap telah melakukan berbagai pelanggaran Hak Asasi Manusia dan budaya.

2.4 Kehidupan Perempuan dan Tradisi *Bacha Posh* Era Transisi (2014 – 2021)

Setelah Tragedi 9/11, atau dikenal juga dengan Tragedi *Black Tuesday*, Amerika Serikat secara resmi memukul mundur pasukan Taliban di Afghanistan dan memulai kerjasama dengan pemerintah Afghanistan yang saat itu berkuasa. Setelah hampir 20 tahun melawan kekuasaan Taliban, dan memperjuangkan kedaulatan Afghanistan, pada akhir masa jabatan Presiden Donald Trump, tepatnya tahun 2020, ia melakukan pertemuan dengan Taliban. Pada pertemuan tersebut pemerintah Amerika Serikat menyatakan bahwa pertemuan ditujukan untuk mencapai perdamaian dan kebijakan perbaikan antara pemerintah Afghanistan dengan Taliban. Meskipun hingga akhir masa jabatannya, Donald Trump belum berhasil merumuskan perjanjian dengan Taliban, namun hal tersebut nyatanya masih dilanjutkan oleh masa kepemimpinan Presiden Joe Biden (Qazi, 2020).

Jalan yang ditempuh oleh Presiden Donald Trump maupun Presiden Joe Biden ini justru dinilai oleh banyak peneliti bukan sebagai upaya perdamaian, melainkan alasan kepentingan nasional dan rasional Amerika Serikat terkait dengan stabilitas finansial mereka. Hasil dari pertemuan Taliban dengan Amerika Serikat sendiri

menghasilkan perjanjian terkait dengan penarikan mundur seluruh pasukan militer Amerika Serikat dari Afghanistan.

Gagasan terkait dengan perjanjian tersebut berawal pada masa reformasi pemerintahan Afghanistan tahun 2014. Pada saat itu kursi pemerintahan Afghanistan secara resmi dipimpin oleh Presiden Ashraf Ghani. Sejak awal memimpin Afghanistan, Presiden Ghani sudah menandatangani terkait dengan perjanjian bilateral keamanan nasional dengan Amerika Serikat dan sekutu – sekutunya, serta menandatangani perjanjian peleburan status pasukan militer Afghanistan dengan NATO. Sayangnya, awal reformasi Afghanistan ini dinilai sangat gagal. Ekonomi Afghanistan memiliki kenaikan yang lambat hingga munculnya ketidakstabilan politik. Kondisi ini disusul adanya pemberontakan – pemberontakan baru dari Taliban di Afghanistan. Pemberontakan ini semakin parah setelah adanya penarikan pasukan militer sekutu Amerika Serikat, yaitu Jerman, pada tahun 2015 (Marticoriena, 2014).

Akibat dari serangan tersebut, ICC melaporkan bahwa perlawanan antara tentara militer Amerika Serikat dengan pasukan Taliban menyebabkan hancurnya rumah sakit pusat MSF atau *Medecins Sans Frontieres* yang terletak di provinsi utara Kunduz, Afghanistan. Dalam serangan tersebut terdapat 22 orang tewas (ICC, *International Humanitarian Issue and Afghan Conflict*). Hal ini kemudian dikecam oleh ICC sebagai lembaga tinggi kebijakan kejahatan kriminal internasional karena sikap yang ditunjukkan Amerika Serikat selama membela Afghanistan justru banyak melanggar Hukum Humaniter Internasional.

Dalam *Committee Against Torture*, ICC juga menyatakan bahwa dalam periode satu tahun pasca penandatanganan perjanjian antara Afghanistan dan Amerika Serikat serta NATO oleh pemerintah baru Afghanistan, justru Amerika Serikat telah banyak melakukan pelanggaran kemanusiaan. Terdapat 70 dugaan pelecehan terhadap tahanan di Afghanistan oleh militer Amerika Serikat. Selain itu, terdapat 88 tahanan yang mengaku mengalami penyiksaan yang dilakukan oleh pasukan militer Amerika Serikat (ICC, *Report on Preliminary Examination Activities*, 2016). Terlebih lagi, munculnya

skandal seksual di lingkungan pemerintahan Afghanistan. Dimana pejabat tinggi dan juga kepala militer Amerika Serikat yang bertanggungjawab di Afghanistan melakukan pemerkosaan hingga praktik prostitusi pada setiap perempuan di wilayah perkantoran Afghanistan. Beberapa dari korban dilaporkan memiliki dampak klinis yang signifikan seperti masalah psikologi dan juga perilaku, antara lain insomnia, halusinasi, paranoia, bahkan percobaan bunuh diri (ICC, Report on Preliminary Examination Activities , 2016).

Sayangnya, keterkaitan pemerintah Afghanistan dalam perjanjian Bilateral dan militer dengan Amerika Serikat membuat pemerintah Afghanistan tidak dapat berkuat pada pelanggaran – pelanggaran yang dilakukan oleh militer Amerika Serikat. Terdapat dua perjanjian yang ditandatangani oleh Afghanistan, yaitu perjanjian BSA dan perjanjian SPA. Perjanjian BSA atau *Bilateral Security Agreement* adalah perjanjian terkait kedudukan militer Amerika Serikat di Afghanistan. Dalam perjanjian tersebut, pihak militer Amerika Serikat juga meminta adanya perlindungan dan kekebalan hukum dari pemerintah Afghanistan. Sehingga pihak militer Amerika Serikat tidak dapat diadili dan diajukan pada peradilan hukum oleh pemerintah Afghanistan. Sedangkan perjanjian SPA atau *Strategic Partnership Agreement* adalah perjanjian kerjasama terkait dengan stabilitas politik Afghanistan. Perjanjian ini nantinya akan menjadi dasar hukum bagi Amerika Serikat untuk dapat terlibat dalam pengambilan keputusan dan kebijakan dari pemerintah Afghanistan (ICC, Report on Preliminary Examination Activities , 2016).

Selama pemberontakan terjadi, pada tahun 2014, perempuan dan anak mendapatkan pengawasan dan bantuan sosial melalui RAWA atau *Revolutionary Association of the Women of Afghanistan*. RAWA merupakan organisasi perempuan dibawah pemerintahan Afghanistan yang didirikan sejak tahun 1977 (RAWA, rawa.org, n.d.). RAWA memiliki lingkup bantuan sosial dan pendidikan secara nasional. Sepanjang RAWA berdiri, organisasi ini lebih aktif membantu pengajaran terkait membaca dan menulis, serta memberikan pemahaman terkait hak – hak mereka

sebagai seorang perempuan. Selain itu, RAWA juga memberikan pelatihan keterampilan bagi perempuan di Afghanistan. Salah satunya adalah pelatihan yang diberikan pada perempuan – perempuan di wilayah perbatasan Afghanistan, yaitu wilayah Mazhar e-Sharif (RAWA, rawa.org, n.d.).

Meskipun pada masa pendudukan Amerika Serikat di Afghanistan perempuan lebih mendapatkan kemajuan terkait dengan hak – haknya dalam bekerja dan berpendidikan. Namun kondisi Afghanistan yang masih belum stabil terkait ekonomi dan banyaknya pemberontakan etnis membuat masyarakat Afghanistan masih dilanda krisis ekonomi parah. Bahkan krisis terkait air bersih dan juga listrik menjadi ancaman bagi masyarakat, tidak terkecuali perempuan di Afghanistan.

Kondisi krisis tersebut nyatanya semakin menekan banyaknya anak perempuan dibawah umur untuk melakukan Tradisi *Bacha Posh*. Menurut data dari AIHRC tahun 2014, terdapat lebih dari 33% korban Tradisi *Bacha Posh* digunakan sebagai pemuas seksual alih – alih mereka dipekerjakan (AIHRC, Survey of Harassment of Women and Children in Afghanistan, 2002). Sedangkan bagi perempuan dewasa yang sudah tidak lagi bisa melaksanakan Tradisi *Bacha Posh*, banyak memilih untuk menikah atau bahkan mencari penghasilan dengan usaha dari rumah. Salah satunya adalah usaha tenun karpet yang juga hasil dari pelatihan dan upaya social dari RAWA. Usaha tenun karpet ini juga menjadi ciri khas bagi perempuan di Afghanistan, khususnya di wilayah Mazhar e-Sharif (AID, 2000).

Keputusan Amerika Serikat untuk melakukan perjanjian dengan Taliban pada tahun 2020 ini tentu menjadi kontroversi bagi negara – negara global. Kehadiran militer Amerika Serikat di Afghanistan justru memunculkan adanya ketergantungan yang signifikan dari stabilitas negara dan keamanan militer Afghanistan. Dalam operasi militer Amerika Serikat di Afghanistan sejak tahun 2002 hingga Agustus 2021, Amerika Serikat telah mengeluarkan biaya operasi militer mencapai lebih dari US\$ 88 Miliar (Ariebowo, 2009). Selain itu, perbedaan prinsip dan visi antara pemerintah Afghanistan dengan Taliban semakin mempersulit posisi Amerika Serikat. Pemerintah

Afghanistan menginginkan adanya demokrasi modern di Afghanistan, sedangkan Taliban bersikeras untuk menyebarluaskan paham islamisme dan sistem pemerintahan syariah secara konservatif (VOA, n.d.). Terlebih lagi, di awal tahun 2020, muncul pandemic Covid-19 yang menekan stabilitas ekonomi global. Tentu saja hal ini juga berdampak pada semakin porak – porandanya kondisi ekonomi dan krisis di Afghanistan.

2.5 Kejahatan Kemanusiaan Oleh Kelompok Taliban dalam Tradisi *Bacha Posh*

Tradisi *Bacha Posh* merupakan salah satu Tradisi yang berkembang di wilayah Afghanistan pasca Perang Dunia 1, terlebih pasca kependudukan Taliban di Afghanistan sekitar periode tahun 1996 hingga tahun 2001. Secara Harfiah, *Bacha Posh* berarti “Berpakaian layaknya laki – laki”. Didalam dunia internasional, Tradisi *Bacha Posh* ini lebih dikenal dengan Tradisi dalam praktik budaya dimana keluarga tanpa anak laki – laki harus mengorbankan anak perempuannya menjadi seorang *Bacha* (Pelaku Tradisi *Bacha Posh*) demi meningkatkan taraf hidup dan strata keluarga (Norderg J. , 2010). Masa kepemimpinan Taliban di era tahun 1996 hingga tahun 2001 ini justru semakin menekan adanya pergerakan perempuan dan meningkatkan adanya perbudakan akan perempuan. Islamisme yang dibawa Taliban meyakini bahwa perempuan hanyalah boneka yang sewaktu – waktu dapat menimbulkan dosa bagi laki – laki. Perempuan mampu melemahkan ketegasan dan kerasnya laki – laki. Selain itu, perempuan memiliki *stereotype* sebagai individu lemah yang selalu membutuhkan perlindungan. Bidang pendidikan dan lapangan pekerjaan, pada masa ini hanya diperuntukkan bagi kaum laki – laki saja. Kaum perempuan hanya diberikan kebebasan sebagai seorang istri yang selalu berdiam diri dirumah dan mengurus anak. Bahkan, Taliban menerapkan peraturan bahwa setiap perempuan yang hendak pergi keluar rumah hendaknya didampingi oleh sanak saudara laki – lakinya, baik ayah maupun saudara kandung laki – laki atau bahkan suaminya. Sehingga adanya praktik *Bacha Posh* semakin marak di masyarakat Afghanistan.

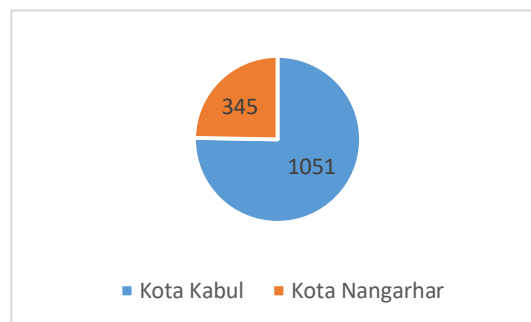
Bacha Posh sendiri memaksa setiap individu yang melakukan Tradisi tersebut untuk merubah penampilan hingga cara bersosial masyarakat dari seorang perempuan menjadi seorang laki – laki. Setidaknya ada 2 kota di Afghanistan yang memiliki persentase besar masyarakatnya melaksanakan Tradisi ini, yaitu kota Kabul dan kota Nangarhar (Norderg J. , 2010). Di Kota Kabul, dari 20 anak perempuan setidaknya ada 1 diantara mereka yang harus melaksanakan Tradisi *Bacha Posh*. Sedangkan di Kota Nangarhar, dari 20 anak perempuan, 3 diantaranya melaksanakan tradisi ini. Bahkan, sejumlah peneliti juga sempat menyatakan bahwa di Kota Pashtun juga terdapat sebagian besar penganut Tradisi *Bacha Posh* (Norderg J. , 2010).

Tabel 2.3 Persentase Relasi Pelaku Tradisi *Bacha Posh*

NO	RELASI	PERSENTASE
1	Saudara Kandung Perempuan	14,3 %
2	Ponakan Perempuan	10,2 %
3	Bibi	8,2 %
4	Kakak Ipar Perempuan	8,2 %
5	Ibu Mertua	2 %
6	Teman Dekat Perempuan	16,5 %

Andry Gibbs pada tahun 2014 sempat melakukan penelitian yang sama terkait dengan pembuktian sebaran penganut Tradisi *Bacha Posh* di Afghanistan. Ada setidaknya 1396 perempuan yang dijadikan sampel dalam penelitian tersebut. Dimana 1051 perempuan merupakan warga Kota Kabul, dan 345 perempuan berasal dari Kota Nangarhar (*Diagram 2.2*). Dari penelitian ini ditemukan bahwa 59,1% responden merupakan *Bacha* atau pelaku Tradisi *Bacha Posh*. Menurut keterangan yang mereka sampaikan, sesuai dengan *Tabel 2.3*, bahwa 14,3% menyatakan bahwa saudara kandung mereka, 10,2% responden menyatakan bahwa ponakan mereka, 8,2% responden menyatakan bahwa bibi mereka, 8,2% menyatakan kakak ipar mereka, 2% menyatakan bahwa ibu mertua mereka, dan 16,5% menyatakan bahwa teman dekat mereka, semuanya adalah *Bacha* dalam Tradisi *Bacha Posh* (Gibbs, 2018).

Diagram 2.2 Pelaku Tradisi *Bacha Posh* 2014



Dalam penelitian yang dilakukan oleh Andy Gibbs juga berhasil menyatakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan diantara pelaku Tradisi *Bacha Posh* di Kota Kabul dengan pelaku Tradisi *Bacha Posh* di Kota Nangarhar. *Bacha* di wilayah Kabul cenderung lebih memiliki kehidupan yang sukses setelah mereka melaksanakan Tradisi ini. Bahkan mereka berhasil memiliki tabungan besar karena adanya peluang pekerjaan yang tinggi. Sedangkan bagi setiap *Bacha* di Kota Nangarhar, potensi untuk mendapatkan pekerjaan masih cenderung sangat kecil. Hal ini dimungkinkan karena

adanya pandangan konservatif dari pemerintah Taliban yang lebih banyak bermarkas di Nangarhar sebagai bagian perbatasan Afghanistan dengan Pakistan. Pandangan konservatif ini mengakibatkan adanya ketertutupan dari pemerintah dalam kaitannya melakukan kerjasama untuk membuka lebih banyak lapangan pekerjaan (Gibbs, 2018). Sehingga, meskipun para *Bacha* di Kota Nangarhar melakukan Tradisi *Bacha Posh*, hal ini tidak membuka kemungkinan mereka akan mendapatkan kebebasan secara maksimal dan adanya peluang – peluang besar dalam hal pendidikan dan pekerjaan. Meskipun demikian, pada akhirnya di dua kota tersebut secara tidak langsung menyatakan bahwa hidup dan matinya seorang perempuan ditentukan pada jumlah anak laki – laki dan pelaksanaan Tradisi *Bacha Posh* (Gibbs, 2018). Karena setidaknya dengan terpenuhinya jumlah anak laki – laki di dalam keluarga, maka setiap anak perempuan akan mendapatkan kebebasan untuk keluar rumah dan melanjutkan hidupnya sebagai perempuan didalam masyarakat. Sedangkan, apabila jumlah anak laki – laki tidak terpenuhi dalam setiap keluarga, maka pelaksanaan Tradisi *Bacha Posh* menjadi satu – satunya alternatif dalam memberikan kebebasan di dalam keluarga dan keamanan bagi setiap keluarga di Afghanistan. Dengan tingginya jumlah persentase anak perempuan di Afghanistan daripada jumlah anak laki – laki, maka akan meningkatkan kemungkinan lebih banyaknya *Bacha* dalam pelaksanaan Tradisi *Bacha Posh*.